

DAMPAK KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN GRESIK (STUDI PADA SEKOLAH PEREMPUAN DESA SUMBERGEDE KECAMATAN WRINGINANOM)

Niken Ayu Dewanti

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
nikenayu443@gmail.com

Dr. Weni Rosdiana, S. Sos., M.AP.

D-IV Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
wenirosdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Gender merupakan pengkotakan hasil pola pikiran manusia terhadap laki-laki dan perempuan. Stereotip gender masih menjadi kebiasaan masyarakat Desa Sumbergede yang diakibatkan rendahnya tingkat pendidikan perempuan dibandingkan laki-laki di Desa Sumbergede dan belum hilangnya anggapan perempuan hanya boleh melakukan pekerjaan domestik. Sekolah Perempuan Desa Sumbergede merupakan inovasi program yang dijalankan oleh LSM Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan (KPS2K) bersama Pemerintah Kabupaten Gresik di bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dampak Sekolah Perempuan di Desa Sumbergede Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah dampak individual, dampak terhadap organisasi, dampak terhadap masyarakat, dan dampak terhadap lembaga dan sistem sosial. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Sedangkan teknik analisis datanya yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian adalah dampak individual memberikan dampak pada aspek psikis, biologis, ekonomi dan sosial para perempuan yang menjadi peserta Sekolah Perempuan Desa Sumbergede dan suami dari peserta Sekolah Perempuan Desa Sumbergede. Dampak terhadap organisasi yaitu adanya interaksi antar peserta Sekolah Perempuan lebih akrab serta adanya rasa solidaritas persaudaraan dan kerukunan yang tinggi sebagai sesama perempuan. Dampak terhadap masyarakat yaitu sangat membantu dalam mengakses pelayanan publik berupa pengurusan dokumen kependudukan dan perbaikan data KIS-PBI. Dampak lembaga dan sistem sosial adalah lebih mudah mendapatkan data kependudukan lebih akurat dari warga secara langsung. Dengan demikian peneliti memberikan saran yaitu untuk mengadakan pelatihan pendidikan keluarga berwawasan gender dan mengembangkan kegiatan yang memberdayakan perempuan pada sektor penguatan ranah publik.

Kata kunci: kebijakan publik, gender, Sekolah Perempuan

Abstract

Gender is the dividing pattern of human thoughts towards men and women. Gender stereotyping is still a habit for the people of Sumbergede Village due to the low level of education of women compared to men in Sumbergede Village and the notion that women can only do domestic work. Sumbergede Village Women's School is an innovative program run by the Women's and Sources of Life NGO (KPS2K) together with the Gresik Regency Government in the field of women's empowerment and gender mainstreaming. The purpose of this research is to describe the impact of the Women's School in Sumbergede Village, Wringinanom District, Gresik Regency. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The focus of this research is on individual impacts, impacts on organizations, impacts on society, and impacts on social institutions and systems. Data collection techniques are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The result of the research is that the individual impact has an impact on the psychological, biological, economic and social aspects of the women who participate in the Sumbergede Village Women's School and the husbands of the Sumbergede Village Women's School participants. The impact on the organization is that there is a more intimate interaction between the Women's School participants and a high sense of brotherly solidarity and harmony as fellow women. The impact on society is that it is very helpful in accessing public services in the form of managing population documents and

improving KIS-PBI data. The impact of social institutions and systems is that it is easier to obtain population data more accurately from residents directly. Thus the researchers provide suggestions, namely to hold gender-based family education training and develop activities that empower women in the sector of strengthening the public sphere.

Keywords: public policy, gender, Women's School

PENDAHULUAN

Gender merupakan hasil pola pikiran manusia terhadap laki-laki dan perempuan yang dikotak-kotakkan. Bukan hanya dibedakan, tetapi juga tidak disetarakan. Perempuan dianggap memiliki status sosial, kekuasaan, dan peluang-peluang untuk aktualisasi diri yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Ketidaksetaraan seperti hal itu merupakan hasil dari pengorganisasian oleh masyarakat, bukan karena faktor biologis atau kepribadian signifikan yang dimiliki antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini bukan merupakan kodrat Ilahi, namun dihasilkan sendiri oleh masyarakat yang telah mengakar dan berlanjut hingga turunannya (Ritzer, 2012:794).

Menurut Katjasungkana (Nugroho, 2008) ada beberapa indikator pemberdayaan dan pembangunan gender. indikator-indikator tersebut meliputi:

1. Kesamaan hak mengakses sumberdaya produktif
2. Partisipasi individu dalam mendayagunakan sumber daya yang terbatas
3. Melakukan pengawasan atas penggunaan sumberdaya
4. Dapat merasakan dampak pembangunan bersama dengan adil.

Permasalahan gender menjadi menarik perhatian selain berkaitan dengan aspek psiko-sosiologis ternyata berkaitan juga dengan aspek teologis. Kesetaraan gender ialah kesamaan antara kondisi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang dan haknya sebagai masyarakat, untuk memiliki peran dan ikut andil dalam segala kegiatan dalam bidang pendidikan, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta untuk menikmati hasil pembangunan tersebut bersama-sama. Kesetaraan gender inipun meliputi tentang dihapuskannya perbedaan-perbedaan atau diskriminasi dan ketidakadilan yang terstruktur baik terhadap laki-laki maupun perempuan (Diana, 2018: 56).

Meskipun kesetaraan dan keadilan gender telah banyak berkembang di berbagai kondisi negara, namun pada struktur sosial yang ada di

masyarakat di dunia masih terdapat garis penghalang untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Salah satunya yaitu budaya patriarkhi yang masih ditanamkan oleh masyarakat. Patriarkhi merupakan pola susunan keluarga yang sangat memerhatikan garis keturunan bapak. Pada masyarakat patriarkhi, perempuan diposisikan tidak setara dengan laki-laki akibat nilai budaya yang berhubungan dengan seksualitas perempuan. Dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari sosial, politik, ekonomi, dan hukum terhadap perempuan tampak jelas ketimpangannya. Kondisi ini dapat memicu timbulnya marjinalisasi yang berujung pada tindakan-tindakan eksploitatif yang akhirnya menjadi ancaman bagi pembangunan masyarakat Indonesia. Eksploitasi tersebut masih ditemui di lingkup rumah tangga bahkan pada lingkup publik (Kusumawardhana dan Abbas, 2018: 158).

Melalui kesetaraan gender dengan pendidikan alternatif sebagai modal awal, diharapkan dapat membantu kebijakan pembangunan pemerintah. Untuk itu penyadaran terhadap gender sangat diperlukan sebagai bentuk pembangunan. Selain itu apabila pembangunan tidak hanya bertumpu pada laki-laki maka efektivitas yang ditawarkan nantinya akan semakin terorganisir. Pendidikan yang ditawarkan nantinya akan terfokus pada peningkatan sumber daya manusia terutama pada perempuan yang bertujuan sebagai pembangunan bangsa (Asyiah dkk, 2017:2). Hakikat dan tujuan pembangunan nasional yaitu mengubah kualitas sumberdaya manusia menjadi lebih baik dan tercapainya suatu kesejahteraan rakyat. Tercapainya tujuan dari pembangunan nasional merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang memiliki peran dan fungsi yang sangat penting (Iskandar, 2016: 17). Salah satu kunci dari keberhasilan suatu pembangunan adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan mempertimbangkan keberagaman aspirasi dan cara pandang seluruh masyarakat (Surjadi dkk, 2010: 57).

Tiga fenomena umum yang harus diperhatikan sehubungan dengan ketimpangan gender antara lain:

1. Stereotip gender yang telah menjadi kebiasaan

2. Burden (beban kerja ganda) yang terlalu melekat pada kaum perempuan
3. Marginalisasi kaum perempuan dalam pembangunan yang dianggap tidak penting (Mukhopadhyay, 2018: 4)

Kondisi tersebut terlihat di 16 desa Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik dengan penduduk berkeluarga sejumlah 22.415 keluarga dengan pasangan usia subur sejumlah 5.618 pasangan, dengan tingkat pendidikan SD-SMA/SMK sejumlah 8.266 anak, kemudian kurang lebih 2.942 anak yang putus sekolah dan menikah di usia masih remaja, dibuktikan terkait tersebarinya berita melalui surat kabar yang menyatakan bahwa masih ada anak di bawah umur yang menikah dan itu terjadi di wilayah Kecamatan Wringinanom, bunyi kutipan surat kabar tersebut adalah “Di Gresik ada tren peningkatan perempuan yang menikah sebelum berusia 21 tahun. Data Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (KBPP) Kabupaten Gresik menyebutkan temuan terbanyak ada di Kecamatan Wringinanom” (Surya, 2016).

Di wilayah Kecamatan Wringinanom terdapat desa yang masyarakatnya berpendidikan rendah, desa tersebut adalah Desa Sumbergede. Desa Sumbergede merupakan desa yang terletak di ujung barat Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Mojokerto, kemudian sarana dan prasarana pendidikan yang terbatas sehingga masyarakat desa merasa kesulitan untuk mengakses pelayanan publik yang ada di Kabupaten Gresik karena jarak yang terlampaui jauh. Berikut daftar sarana dan prasaran yang ada di Desa Sumbergede:

Tabel 1
Sarana dan Prasarana Desa Sumbergede

No	Sarana/Prasarana	Jumlah
1	Praktek Bidan	2
2	Poskesdes	1
3	Polindes	1
4	Posyandu	3
5	Warnet	1
6	Masjid	5
7	Mushola	16
8.	SD	1
9.	TK	1
10.	TPQ	1

Sumber: Profil Desa Sumbergede 2016

Penduduk Desa Sumbergede pada tahun 2018 sejumlah 2.259 jiwa, dengan 1.115 jiwa

penduduk laki-laki dan 1.144 jiwa penduduk perempuan. Karena kurangnya sentuhan pendidikan pada desa tersebut sehingga di Desa Sumbergede tersebut seringkali terjadi pernikahan usia anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan rendahnya kuasa perempuan sebagai pembuat keputusan untuk diri mereka sendiri (Profil Desa Sumbergede Kecamatan Wringinanom 2016). Untuk itu Kabupaten Gresik menanggapi secara serius tentang pelaksanaan PUG di daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Gresik mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 tahun 2012 tentang PUG dalam Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan dari kebijakan PUG dalam pembangunan daerah telah berjalan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang PUG dalam Pembangunan Daerah. Adapun tujuan dari adanya Peraturan Daerah tersebut antara lain:

1. sebagai acuan bagi aparat pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender di berbagai tahapan atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah,
2. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan,
3. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan dengan memperhatikan kearifan agama dan nilai budaya masyarakat Kabupaten Gresik,
4. adanya pengelolaan anggaran yang responsif gender,
5. mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai sumber daya pembangunan,
6. serta meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Di dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa PUG dilaksanakan oleh semua instansi organisasi perangkat daerah di Kabupaten Gresik dan badan yang menangani pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, yaitu Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dengan adanya perda tersebut, Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengembangkan Sekolah Perempuan yang ada di wilayah Kabupaten Gresik termasuk Sekolah Perempuan di Desa Sumbergede

Kecamatan Wringinanom. Sekolah Perempuan ini merupakan bentuk inovasi kerja sama antara organisasi non pemerintah (NGO) yakni LSM Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan (KPS2K) dan pemerintah daerah sejak 2014 tentang pemberantasan kemiskinan melalui peningkatan akses keadilan gender.

Sekolah Perempuan 4 desa di Kecamatan Wringinanom ini merupakan sekolah non formal dengan peserta sebanyak 986 warga belajar periode tahun 2014-2019. Peserta tersebut mayoritas adalah lulusan SD dan SMP yang berusia produktif hingga lansia yaitu 15-70 tahun dan menikah kurang dari usia 17 tahun, dengan peserta sejumlah 268 orang di Desa Sumbergede yang telah dibagi menjadi 5 kelompok Sekolah Perempuan. Pengisi materi dalam setiap kegiatan pembelajaran adalah staf lapangan dari LSM Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan (KPS2K) yang telah berpengalaman dan buku yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran adalah Modul Adil Gender. Tempat belajar yang digunakan untuk pelaksanaan Sekolah Perempuan di Desa Sumbergede adalah tempat yang sederhana terutama fasilitas umum seperti balai desa dan balai dusun agar terbiasa menggunakan fasilitas umum, mudah dijangkau oleh ibu-ibu, dan berpindah-pindah agar ibu-ibu tidak merasa bosan pada saat pembelajaran atau mendapat materi.

Strategi dengan adanya Sekolah Perempuan ini telah mampu mengubah kondisi marjinal yang masih saja dialami oleh perempuan di Kabupaten Gresik, pembatasan perempuan untuk turut terlibat di ruang publik yang ditimbulkan oleh pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, pendidikan yang rendah, dan rendahnya kuasa perempuan sebagai pembuat keputusan untuk diri sendiri. Oleh karenanya kegiatan dalam Sekolah Perempuan lebih banyak mengarah pada membangun kesadaran kritis perempuan terhadap hak-haknya agar mereka mampu menjadi pemimpin untuk dirinya dan publik. (kbp.gresikkab.go.id)

Keberhasilan dari implementasi kebijakan PUG melalui Sekolah Perempuan yang ada di Kecamatan Wringinanom itu diungkapkan oleh Sri Yoeni Ambarwati, S. Sos., selaku Kasi Pengarusutamaan Gender mengatakan:

“Yang dicapai dari sekolah perempuan antara lain, yaitu tumbuhnya kesadaran perempuan untuk mengubah nasib, kemudian perempuan terjamin kesehatannya, perempuan mandiri secara ekonomi dan

politik. Perempuan mampu membuat keputusan di tingkat domestik dan publik. Perempuan mampu berperan sebagai penggerak pembangunan di tingkat desa/kelurahan sampai kabupaten.” (wawancara pada wawancara tanggal 29 Januari 2019 pukul 11.02 WIB)

Adanya capaian diimplementasikannya sekolah perempuan sehingga mengantarkan Kabupaten Gresik memperoleh penghargaan. Kabupaten Gresik mendapatkan penghargaan di bidang pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah, yaitu Anugerah Parahita Ekapraya kategori madya di tahun 2016 dan kategori utama di tahun 2018 yang didedikasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Istana Wakil Presiden (gresikkab.go.id). Penghargaan selain di tingkat Nasional, sekolah perempuan membawa Kabupaten Gresik mendapatkan penghargaan di ajang Otonomi Award tahun 2018. (harianbhirawa.com)

Diberitakan berhasil dalam pelaksanaannya namun masih terdapat permasalahan yaitu kurangnya data yang mendukung program, peraturan teknis yang masih dalam tahap penyusunan, dan rendahnya pemahaman program pemberdayaan perempuan di tingkat desa. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala sub-bidang Pengarusutamaan Gender Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik, Ir. Soerati Mardiyarningsih, M.Si., sebagai berikut:

“Terkait pelaksanaan Sekolah Perempuan di Kecamatan Wringinanom, kami tidak memegang data pendukung program secara utuh, karena yang menjalankan sekolah perempuan ini adalah LSM KPS2K. Peraturan teknis terkait pelaksanaan juga masih dalam tahap penyusunan, ini baru mulai membuat draft, karena waktu itu dinas melihat dulu Sekolah Perempuan ini sekolah yang seperti apa sehingga belum ada persiapan sama sekali.” (wawancara pada tanggal 29 Januari 2019 pukul 10.00 WIB).

Setiap kebijakan yang diterapkan memiliki dampak yang diharapkan maupun dampak yang tidak terduga. Berdasarkan hal tersebut maka masih perlu mengevaluasi guna mendapatkan data yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan implementasi kebijakan, program dan kegiatan, mengetahui apakah kebijakan, program

dan kegiatan tersebut telah mencapai hasil yang diinginkan sehingga dapat dijadikan sumbangan klarifikasi dan kritik terhadap kebijakan, program dan kegiatan yang telah diimplementasi dan dapat diketahui dampak yang timbul. Untuk itu, maka kebijakan maupun program dan kegiatan pada penelitian ini dapat dianalisis dampaknya menggunakan teori evaluasi dampak yang dikemukakan oleh Finsterbusch dan Motz dalam Wibawa (1994: 54-60) yang meliputi beberapa indikator yakni dampak individual, organisasional, masyarakat dan dampak terhadap lembaga dan sistem sosial.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang dampak yang timbul dari kebijakan PUG, lebih tepatnya dampak Sekolah Perempuan di Desa Sumbergede Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik dengan judul “Dampak Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Studi pada Sekolah Perempuan Di Desa Sumbergede Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik)”.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang menggunakan fokus penelitian yakni teori evaluasi dampak dari Finsterbusch dan Motz (Wibawa, 1994:54-60). Penentuan subjek dari penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Peneliti mengambil informan sebanyak 15 orang yang terdiri dari:

- 1) Ketua LSM Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan (KPS2K),
- 2) Staf lapangan LSM Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan (KPS2K),
- 3) Perangkat Desa Sumbergede,
- 4) BPD Sumbergede
- 5) 6 peserta Sekolah Perempuan
- 6) 3 warga Desa Sumbergede
- 7) 2 suami peserta Sekolah Perempuan Desa Sumbergede

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi kondisi lingkungan dan perkembangan perilaku serta kemajuan belajar peserta Sekolah Perempuan Desa Sumbergede, dokumentasi kegiatan yang dilakukan ketika pembelajaran di Sekolah Perempuan Desa Sumbergede dan wawancara terkait fokus penelitian terhadap informan penelitian. Sedangkan teknik analisis datanya yaitu dengan model interaktif

menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2015:246) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekolah Perempuan merupakan bagian dari program Gender Watch, sebuah inovasi program yang sudah cukup lama dijalankan oleh LSM Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan (KPS2K) bersama dengan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender. Sekolah Perempuan ini merupakan sekolah non formal yang dibentuk oleh Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan (KPS2K) yang bertujuan untuk melakukan pemantauan data terhadap penerima Program Jaminan Kesehatan Nasional terutama penerima KIS-PBI (Kartu Indonesia Sehat-Penerima Bantuan Iuran), hingga saat ini terhitung Program Sekolah Perempuan telah 6 tahun diimplementasikan di Kecamatan Wringinanom. Pada tahun 2019, jumlah peserta Sekolah Perempuan di Kecamatan Wringinanom sebanyak 986 orang yang tersebar di 4 desa. Berikut daftar jumlah peserta Sekolah Perempuan di Kecamatan Wringinanom menurut desa:

Tabel 2

Daftar Jumlah Peserta Sekolah Perempuan Menurut Desa

No.	Nama Desa	Jumlah
1.	Kesamben Kulon	383
2.	Mondoluku	87
3.	Sooko	248
4.	Sumbergede	268
Jumlah Keseluruhan		986

Sumber: LSM KPS2K

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa peserta Sekolah Perempuan dari Desa Sumbergede sebanyak 268 orang yang tersebar dalam 5 dusun yang ada di Desa Sumbergede. Dusun-dusun tersebut adalah Dusun Betro, Dusun Mulyorejo, Dusun Sambikerep, Dusun Sumbergede dan Dusun Sumbersuko yang masing-masing di dusun tersebut terdapat warga perempuan yang menjadi peserta Sekolah Perempuan.

Sekolah Perempuan Desa Sumbergede dilaksanakan tidak terikat hari dan waktu dikarenakan peserta Sekolah Perempuan Desa Sumbergede adalah ibu-ibu rumah tangga dan bermata pencaharian sebagai buruh tani. Mereka

melaksanakan kegiatan berdasarkan kesepakatan bersama. Jadwal untuk pelaksanaan Sekolah Perempuan di tingkat dusun sebanyak dua kali pertemuan dalam satu bulan. Sedangkan untuk tingkat desa dalam satu bulan dilaksanakan satu kali pertemuan.

Tabel 3

Daftar Jumlah Peserta Sekolah Perempuan di Desa Sumbergede Menurut Dusun

No.	Nama Dusun	Jumlah
1.	Dusun Bero	35
2.	Dusun Mulyorejo	56
3.	Dusun Sambikerep	42
4.	Dusun Sumbergede	94
5.	Dusun Sumbersuko	41
Jumlah Keseluruhan		268

Sumber: LSM KPS2K

Program kegiatan dalam pembelajaran di Sekolah Perempuan Desa Sumbergede yaitu melalui:

- 1) Kegiatan Bank Sampah
Kegiatan bank sampah ini mengajarkan ibu-ibu untuk peduli dengan lingkungan dan menghasilkan rupiah. Sampah-sampah yang dimiliki ibu-ibu rumah tangga setiap harinya dikumpulkan sehingga dapat menambah pemasukan dalam mengadakan kegiatan. Hasil penjualan sampah juga dapat dijadikan tabungan bagi ibu-ibu, sehingga yang mengikuti kegiatan bank sampah memiliki tabungan.
- 2) Kegiatan sanggar tari dan rias
Kegiatan sanggar tari dan rias memerlukan pemateri dari luar, ibu-ibu diajarkan menari remo dan sekarang ibu-ibu muda Desa Sumbergede mampu membawakan di acara-acara resmi baik di tingkat Desa maupun di Kabupaten, sedangkan untuk rias ibu-ibu juga diajarkan dalam merias pengantin, merias penari, dan sebagainya.
- 3) Kegiatan membuat koran GEMA Perempuan Pedesaan
Kegiatan membuat koran ini didukung dengan keahlian ibu-ibu muda yang selama ini dimiliki namun belum tersalurkan. Koran GEMA Perempuan Pedesaan ini berisikan tentang pengalaman ibu-ibu selama mengikuti kegiatan. Pada setiap penerbitan koran, koran juga diberikan pada peserta Sekolah Perempuan sehingga ibu-ibu yang lain juga dapat membaca hasil dari kegiatan.

- 4) Kegiatan pertanian berkelanjutan
Dalam kegiatan ini ibu muda diajarkan bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam, mengolah kotoran ternak menjadi kompos sehingga memiliki tanaman organik yang memiliki harga jual tinggi apabila diikuti pada bazar di daerah perkotaan. Kegiatan pertanian berkelanjutan ini mendapat pendampingan dan pendanaan dari dinas pertanian langsung. Hal ini menjadikan ibu-ibu semangat mempertahankan kegiatan ini.
- 5) Kegiatan pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat)
Kegiatan ini dilakukan setiap setahun sekali. Dalam kegiatan ini mengajarkan bahwa kesehatan perempuan perlu dijaga dan diperiksa untuk mengetahui adanya penyakit pada alat reproduksi perempuan. dalam kegiatan ini juga mengajak ibu-ibu yang bukan peserta Sekolah Perempuan Desa Sumbergede.

Selama 6 (enam) tahun berjalan diharapkan memberikan hasil, untuk mengetahui hasil dari program kebijakan dapat dilakukan dengan tahap evaluasi. Namun evaluasi terhadap suatu program kebijakan tidak hanya berhenti pada evaluasi hasil, perlu dilakukan juga evaluasi dampak untuk mengetahui apakah program kebijakan yang dilaksanakan dapat memberikan perubahan kepada kelompok sasaran maupun kelompok kontrol.

Evaluasi dampak Sekolah Perempuan di Desa Sumbergede Kecamatan Wringinanom ini dikaji dengan teori evaluasi dampak menurut Finsterbusch dan Motz (Wibawa, 1994:54-60). Adapun pemaparan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat menganalisis dampak Sekolah Perempuan di Desa Sumbergede Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik dengan teori evaluasi dampak yang dikemukakan oleh Finsterbusch dan Motz (Wibawa, 1994:54-60). Teori yang dikemukakan tersebut yaitu dampak individual, dampak terhadap organisasi, dampak terhadap masyarakat, serta dampak terhadap lembaga dan sistem sosial. Berikut uraian dari indikator-indikator tersebut:

1. Dampak Individual

Dalam penelitian Tri Yumarni dan Dilanthi Amaratunga (2018:553) menyebutkan bahwa pengarusutamaan gender dapat menjadi strategi untuk mengurangi kerentanan sosial, yaitu dengan memberikan manfaat sosial bagi perempuan miskin,

menyediakan jaminan kesehatan bagi perempuan miskin, memberikan bantuan sosial bagi perempuan dengan status sosial kurang mampu dan memberikan pendidikan alternatif bagi perempuan dan anak perempuan.

Individu merupakan pihak pertama yang terdampak dari suatu kebijakan. Individu yang menjadi sasaran dalam Sekolah Perempuan ini adalah ibu-ibu rumah tangga yang tinggal di Desa Sumbergede Kecamatan Wringinanom dengan kualifikasi tingkat ekonomi menengah ke bawah.

Dampak individual yang dirasakan oleh para perempuan yang menjadi sasaran Sekolah Perempuan di Desa Sumbergede Kecamatan Wringinanom yaitu dampak psikis, biologis, ekonomi dan sosial.

Pelaksanaan Sekolah Perempuan berdampak pada aspek psikis, biologis, ekonomi dan sosial pada para perempuan peserta Sekolah Perempuan Desa Sumbergede. Dampak psikis dan biologis yang dirasakan oleh peserta Sekolah Perempuan setelah mengikuti Sekolah Perempuan adalah beberapa peserta Sekolah Perempuan merasa senang. Di Sekolah Perempuan para perempuan ini merasa senang, karena dapat belajar bersama dengan peserta Sekolah Perempuan yang lain tanpa rasa canggung, mengingat tingkat pendidikan terakhir mereka yang rata-rata lulusan SD-SMA sehingga mereka memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Berikut suasana pembelajaran regular Sekolah Perempuan di Balai Desa Sumbergede.

Gambar 1.1

**Pembelajaran Reguler Sekolah Perempuan
Desa Sumbergede**



Sumber: LSM KPS2K

Mereka juga merasa terbantu dengan diperkenalkan mengenai permasalahan perempuan, hak-hak perempuan, mengenal perbedaan konsep seks dan gender. Para ibu ini juga mengenal cara menjaga kesehatan reproduksi. Kebanyakan ibu-ibu desa kurang memahami pentingnya kesehatan

reproduksi sehingga hampir seluruh peserta Sekolah Perempuan mengalami gangguan kesehatan pada organ reproduksi. Sekolah Perempuan memberikan fasilitas bagi pesertanya untuk melakukan pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) gratis di puskesmas pembantu yang terletak di Desa Kesamben Kulon Kecamatan Wringinanom. Dengan fasilitas yang disediakan oleh Sekolah Perempuan tersebut dapat mendeteksi dini adanya penyakit-penyakit atau gangguan organ reproduksi yang dialami oleh para ibu-ibu maupun anak perempuan yang masih dalam usia produktif.

Dampak ekonomi yang dirasakan para ibu adalah penghasilan sampingan yang didapat dari bank sampah. Mereka dapat mengumpulkan sampah botol bekas untuk dinominalkan uang di bank sampah. Ada juga beberapa peserta Sekolah Perempuan yang menjadi narasumber seminar kampus ternama di wilayah Jawa Timur. Namun tidak serta merta menjadi narasumber seminar, tapi peserta Sekolah Perempuan yang dianggap cukup menguasai materi yang dibahas. Di Sekolah Perempuan juga diajarkan pertanian berkelanjutan. Para ibu mayoritas bermata pencaharian sebagai buruh tani sangat merasa terbantu, karena mereka diajarkan cara menanam sayur secara hidroponik di rumah masing-masing dan membuat pupuk organik. Dengan begitu dapat menambah pendapatan ibu-ibu selain nafkah dari kepala rumah tangga.

Gambar 1.2

**Kegiatan Bank Sampah Sekolah
Perempuan Desa Sumbergede**



*Sumber: bank sampah Sekolah Perempuan
Desa Sumbergede*

Dampak dari segi sosial yakni peserta Sekolah Perempuan yang aktif selalu mendapat kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan mulai di tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten. Ada

seorang peserta Sekolah Perempuan Desa Sumbergede yang ditunjuk menjadi anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) pada musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dihadiri oleh Bapak Sekretaris Kecamatan Wringinanom.

Peserta Sekolah Perempuan yang semula penakut, diam karena kurangnya pengetahuan, dan hanya bergantung dengan pemikiran suaminya sekarang sudah berani menyampaikan pendapat ketika ada musyawarah perencanaan pembangunan di desa yang awalnya hanya datang, duduk dan diam, peserta Sekolah Perempuan bahkan mampu berbicara dengan bahasa yang baik dan sopan dengan percaya diri. Hal tersebut juga nampak pada saat ibu-ibu peserta Sekolah Perempuan mampu meyakinkan suaminya ketika ada permasalahan di keluarganya dan berkomunikasi secara baik-baik ketika meminta izin dalam mengikuti kegiatan-kegiatan Sekolah Perempuan, karena para suami awalnya melarang seorang perempuan untuk keluar rumah yang terlalu lama (Anggraeni, 2017:10). Kemandirian dalam membuat keputusan dan tidak cemas menjadi kemandirian pada aspek nilai, menurut Steinberg (1993) dalam Nurhayati (2011:133) yang artinya kemampuan memaknai sebuah prinsip yang berkaitan dengan benar dan salah, dan hal penting dan tidak penting.

Gambar 1.3

Musrenbang Perempuan



Sumber: LSM KPS2K

Berdasarkan hasil wawancara, selain dampak yang dirasakan oleh ibu-ibu peserta Sekolah Perempuan, dampak sosial juga dirasakan oleh beberapa suami dari peserta Sekolah Perempuan tersebut diantaranya ialah suami menjadi mengenal berbagi tugas dan peran di dalam rumah. Yang semula pekerjaan rumah dikerjakan oleh istri, sekarang suami menyadari beban pekerjaan rumah yang dilakukan oleh istri setiap hari akan ringan

ketika dapat dikerjakan secara bersama-sama. Suami yang pada awalnya ketika istri mengikuti Sekolah Perempuan maka istri dianggap keluyuran tidak mau mengurus rumah, sekarang menjadi paham dengan diberikan pengertian bahwa di Sekolah Perempuan tidak diajarkan untuk melawan suami, namun lebih diajarkan untuk bernegosiasi supaya tidak ada kesalahpahaman diantara suami dan istri.

2. Dampak Organisasional

Pelaksanaan Sekolah Perempuan di Desa Sumbergede Kecamatan Wringinanom selain memberikan dampak individual, juga memberikan dampak terhadap organisasi. Menurut Finsterbusch dan Motz (Wibawa, 1994:54-60), dampak organisasional dapat diartikan sejauh mana suatu program pemerintah dapat mencapai tujuan yang menjadi visi dan misi dari suatu organisasi sebagai dampak secara langsung, serta mempengaruhi semangat kerja anggota organisasi tersebut sebagai dampak tidak langsung. Program Sekolah Perempuan pasti memberikan beberapa dampak kepada sebuah organisasi yang menaunginya. Dalam penelitian ini yang merasakan dampaknya adalah LSM Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan (KPS2K). Tujuan dari LSM Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan (KPS2K) dibentuk adalah untuk menciptakan kesadaran masyarakat yang berkeadilan gender dan memiliki hak atas pengelolaan sumber-sumber kehidupan yang adil dan berkelanjutan.

Wahyudi (2018:75) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa perempuan masih dianggap sebuah pantangan dan kontroversial dalam kepemimpinan sehingga diperlukan sosialisasi mengenai konsep memberdayakan perempuan terutama pada sektor penguatan ranah publik agar tidak menimbulkan stereotip pada perempuan yang sering dianggap lemah, bodoh, emosional dan sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 pasal 15 terkait pelaksanaan pengarusutamaan gender, dalam hal ini LSM Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan (KPS2K) mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Desa Sumbergede, Kecamatan Wringinanom, dan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik. Pihak LSM selalu berkoordinasi dengan pemerintah terkait kondisi di Sekolah

Perempuan wilayah Kecamatan Wringinanom terutama Desa Sumbergede, namun sangat disayangkan tidak ada fasilitas bantuan untuk menunjang kegiatan pembelajaran bagi peserta Sekolah Perempuan Desa Sumbergede. Sekolah perempuan Desa Sumbergede mengandalkan alokasi dana desa yang sangat terbatas untuk pemberdayaan masyarakat sebagai sumber untuk memfasilitasi kegiatan di Sekolah Perempuan tersebut.

Dampak positif bagi LSM Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan (KPS2K) dari adanya Sekolah Perempuan di Desa Sumbergede yakni para perempuan yang awalnya mereka tidak memahami bahwa perempuan dan laki-laki di mata hukum memiliki hak yang sama kini bisa tahu kesetaraan hak tersebut. Dengan adanya LSM ini para peserta Sekolah Perempuan bisa berkoordinasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang pembelajaran di Sekolah Perempuan terkait pemberian materi. Selain itu, juga dapat menyalurkan aspirasi dari peserta Sekolah Perempuan terkait kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memihak mereka. LSM Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan (KPS2K) juga membuat interaksi antar peserta Sekolah Perempuan Desa Sumbergede lebih akrab serta adanya rasa solidaritas persaudaraan dan kerukunan yang tinggi sesama perempuan. Bahkan sekarang ini LSM Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan dipercaya untuk ikut berperan sebagai fasilitator di Sekolah Perempuan lainnya selain di Kecamatan Wringinanom.

Gambar 2.1
Pelatihan Kepemimpinan Perempuan



Sumber: LSM KPS2K

Selain itu terdapat hambatan dalam pelaksanaan Sekolah Perempuan di Desa Sumbergede yaitu kurangnya akses permodalan dari pemerintah Kabupaten Gresik untuk LSM Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber

Kehidupan (KPS2K). Untuk mengadakan suatu kegiatan setiap anggota mengeluarkan dana pribadi untuk pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini LSM Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan (KPS2K) dapat dikatakan mandiri untuk memenuhi keperluan mereka dalam memfasilitasi kegiatan Sekolah Perempuan Desa Sumbergede karena tidak mendapat bantuan akses permodalan dana kegiatan dari pemerintah lagi.

3. Dampak terhadap Masyarakat

Sekolah Perempuan di Desa Sumbergede Kecamatan Wringinanom pun secara tidak langsung juga berdampak positif terhadap masyarakat. Dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari adanya Sekolah Perempuan di Desa Sumbergede yakni Sekolah Perempuan mempengaruhi masyarakat untuk lebih memahami konsep gender di lingkungan masyarakat terutama keluarga. Memahami makna setara dan adil dalam hal kedudukan, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai sumberdaya pembangunan.

Adanya Sekolah Perempuan Desa Sumbergede membuat masyarakat Desa Sumbergede merasa terbantu dalam mengakses pelayanan publik seperti pengurusan dokumen kependudukan dan perbaikan kartu Indonesia sehat bagi penerima bantuan iuran (KIS-PBI). Karena sebagian besar masyarakat bingung ketika mendapat masalah seperti susahnya klaim dana untuk berobat menggunakan KIS karena data yang tertera di kartu tidak sesuai dengan KTP, sehingga Sekolah Perempuan memiliki akses dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan untuk mendaftarkan ulang dan perbaikan kekeliruan data.

Dampak negatif yang dirasakan masyarakat adalah munculnya keresahan pada awal adanya Sekolah Perempuan di Desa Sumbergede. Ada beberapa kepala keluarga yang kurang memahami maksud dan tujuan dari adanya Sekolah Perempuan sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat ditakutkan dengan adanya Sekolah Perempuan dapat memicu keretakan rumah tangga. Namun lambat laun keresahan tersebut mulai hilang. Pendidikan keluarga berwawasan gender diimbangi dengan penanaman nilai agama dan sifat kodrati perempuan sangat dibutuhkan agar kesetaraan gender yang dipahami dalam keluarga tidak berlebihan (Qomariah, 2019: 57).

4. Dampak terhadap Lembaga dan Sistem Sosial

Sekolah Perempuan di Desa Sumbergede Kecamatan Wringinanom dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah pada BAB VIII Peran Serta Masyarakat pasal yang berbunyi:

“(1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di daerah

(2) Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berfungsi sebagai sumber informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah”

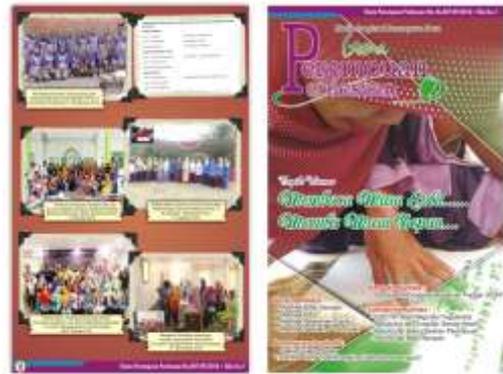
Sebelum dilakukan pembukaan Sekolah Perempuan Pemerintah Kabupaten Gresik menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) atau nota kesepahaman dengan LSM Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan (KPS2K) untuk menandakan bahwa program Sekolah Perempuan memiliki payung hukum.

Pemerintah tidak lepas tangan begitu saja setelah proses penandatanganan nota kesepahaman tersebut, para perempuan Desa Sumbergede yang menjadi sasaran Sekolah Perempuan di Desa Sumbergede mendapatkan sosialisasi dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPP3A) Kabupaten Gresik. Sosialisasi yang diberikan berupa pemahaman terkait Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah, pentingnya konsep seks dan gender, permasalahan perempuan, hak-hak perempuan, dan pemahaman keadilan dan kesetaraan gender. Selain itu, perkembangan setelah proses sosialisasi ada kegiatan pemberdayaan berupa sanggar tari dan rias, pertanian berkelanjutan, bank sampah, pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) dan redaksi koran GEMA Perempuan Pedesaan yang dipandu LSM Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan (KPS2K). Pemberdayaan tersebut dinilai memberikan pengembangan pada kemampuan peserta Sekolah Perempuan Desa Sumbergede dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

Sekolah Perempuan Desa Sumbergede juga turut memeriahkan HUT RI setiap tahunnya dengan melakukan upacara bendera dengan petugas

upacara yang semuanya adalah peserta Sekolah Perempuan itu sendiri sehingga menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air dan menumbuhkan jiwa Pancasila.

Gambar 4.1
Koran Gema Perempuan Pedesaan



sumber: LSM KPS2K

Dampak positif yang dirasakan pemerintah Desa Sumbergede dari adanya Sekolah Perempuan di Desa Sumbergede adalah adanya Sekolah Perempuan membantu pemerintah desa dalam pemetaan penduduk dan pendataan ulang kondisi warga desa, karena ketika pamong desa yang mendata seringkali warga desa memiliki orientasi pemikiran seperti materialistis, mau dimintai keterangan asal ada imbalan. Sehingga untuk mendapatkan keakuratan data sangat kecil sekali. Adanya Sekolah Perempuan dapat mengubah pola pikir warga yang semula materialistis menjadi realistis. Warga mulai bisa terbuka ketika ada pembaruan data kependudukan dengan pendataan ulang yang dilakukan oleh perwakilan Sekolah Perempuan yang mewakili pamong desa.

Pada awalnya pemerintah Desa Sumbergede kurang mendukung adanya Sekolah Perempuan. Peserta Sekolah Perempuan dianggap sebagai “mata-mata” dari pemerintah Kabupaten Gresik oleh perangkat desa karena peserta Sekolah Perempuan Desa Sumbergede memiliki pemikiran yang kritis. Kemudian ada pula anggapan suami-suami peserta Sekolah Perempuan Desa Sumbergede bahwa mengikuti Sekolah Perempuan tidak ada manfaatnya, membuang waktu dan diajarkan untuk berani melawan suami. Namun beberapa tahun setelah itu akhirnya anggapan tersebut mulai hilang karena para peserta Sekolah Perempuan dapat membuktikan bahwa dengan mengikuti Sekolah Perempuan, para perempuan pandai membagi waktu antara mengerjakan pekerjaan rumah dan mengikuti kegiatan Sekolah

Perempuan sehingga para suami menjadi percaya dan yakin bahwa Sekolah Perempuan banyak sekali memberikan pelajaran dan pengalaman untuk istrinya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di Sekolah Perempuan Desa Sumbergede Kecamatan Wringinanom menggunakan teori evaluasi dampak yang dikemukakan oleh Finsterbusch dan Motz (Wibawa, 1994:54-60) maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

Pada dampak individual Sekolah Perempuan memberikan dampak pada aspek psikis, biologis, ekonomi dan sosial pada para perempuan peserta Sekolah Perempuan Desa Sumbergede dan juga suami dari peserta Sekolah Perempuan Desa Sumbergede.

Dampak terhadap organisasi yaitu adanya interaksi antar peserta Sekolah Perempuan lebih akrab serta adanya rasa solidaritas persaudaraan dan kerukunan yang tinggi sebagai sesama perempuan.

Dampak terhadap masyarakat adanya Sekolah Perempuan sangat membantu dalam mengakses pelayanan publik berupa pengurusan dokumen kependudukan dan perbaikan data KIS-PBI.

Dampak lembaga dan sistem sosial adanya Sekolah Perempuan ini adalah lebih mudah mendapatkan data kependudukan lebih akurat dari warga secara langsung. Banyak manfaat yang didapatkan dengan mengikuti Sekolah Perempuan selain belajar juga menambah pengalaman.

Saran

Bersumber dari pemaparan hasil penelitian, peneliti berusaha untuk memberikan saran alternatif untuk meningkatkan keberhasilan program Sekolah Perempuan di Desa Sumbergede Kecamatan Wringinanom sebagai berikut:

1. Mengadakan pelatihan pendidikan keluarga berwawasan gender agar kesetaraan gender yang dipahami dalam keluarga tidak berlebihan.
2. Mengembangkan kegiatan yang memberdayakan perempuan pada sektor penguatan ranah publik agar kaum perempuan lebih memiliki akses untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya:

1. Para Dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA.
2. Ibu Hj. Weni Rosdiana, S. Sos., M.AP. selaku dosen pembimbing yang juga membantu membimbing dan menelaah jurnal yang ditulis oleh peneliti.
3. Kepada Ibu Indah Prabawati, S. Sos., M. Si dan Bapak Badrudin Kurniawan, S. AP., M. AP., M.A selaku dosen penguji
4. Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik, LSM Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan (KPS2K), para ibu peserta Sekolah Perempuan Desa Sumbergede yang membantu proses penelitian.
5. Dan pihak lainnya yang telah memberikan dukungan moral dan material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Peppy Forestry. 2017. *Penyelenggaraan Program Sekolah Perempuan pada LSM KPS2K (Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan) dalam Meningkatkan Kemandirian Ibu Muda di Desa Kesamben Kulon Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik*. J+Plus UNESA, 6 (2), 1-14.
- Asyiah, Adnan, & Mubarak. 2017. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Pasaman*. JPSI (Journal of Public Sector Innovations, 2(1), 1-9.
- Diana, Rita. 2018. *Analisis Ketimpangan Gender Di Provinsi Sumatera Barat (Gender Inequality Analysis in West Sumatera Province)*. Jurnal Kependudukan Indonesia, 13(1), 55-66.
- Diskominfo Kabupaten Gresik. 2018. *Gresik Raih Penghargaan APE Tingkat Nasional*. https://gresikkab.go.id/berita/gresik_raih_penghargaan_ape_tingkat_nasional. Diakses pada 19 Desember 2019.
- Iskandar, Dina Trisiana. 2016. *Evaluasi Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Di Kabupaten Ponorogo*. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 1(1), 17-22.
- Kusumawardhana, Indra dan Rusdi J. Abbas. 2018. *Indonesia Di Persimpangan: Urgensi "Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender" Di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos*

- Aires pada Tahun 2017 (Indonesia at a Crossroads: the urgency of Gender Equality and Justice Act" in Indonesia After Buenos Aires Joint Declaration in 2017). *Jurnal HAM*, 9(2), 153-174.
- Mukhopadhyay, Ujjaini. 2018. *Trade Liberalization and Gender Inequality: Role of Social Norms*. *Indian Growth and Development Review*, 11(1), 2-21.
- Mulyasari, Mega. 2017. *Dampak Program Broadband Learning Center (BLC) Di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya*. *PUBLIKA*, 5(6).
- Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan strategi pengarusutamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Nurhayati, Eti. 2011. *Psikologi Pendidikan Inovatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Daerah Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
- Purwaningsih, Ayu. 2018. *Dampak Program Kampung Unggulan Di Kampung Tempe, Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya*. *PUBLIKA*, 6(4).
- Qomariah, Dede Nurul. 2019. *Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender dalam Keluarga*. *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, 4(2), 52-58.
- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosdiana, Weni. 2015. *Analisis Pemberdayaan Perempuan Desa (Studi di Desa Bulutengger Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(2), 117-132.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, Helmi. *Pemkab Gresik Meraih Penghargaan Otonomi Award dan Kovablik*. harianbhirawa.com/pemkab-gresik-meraih-penghargaan-otonomi-award-dan-kovablik. Diakses tanggal 19 Desember 2019.
- Sutjadi, Erna dkk. 2010. *Public Policy Forum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Wahyudi, Very. 2018. *Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender*. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63-83.
- Wibawa, Samodra dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yumarni, Tri dan Dilanthi Amaratunga. 2018. *Gender Mainstreaming as a Strategy to Achieve Sustainable Post-Disaster Reconstruction*. *Built Environment Project and Asset Management*, 8(5), 544-556.